

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah adalah suatu proses terstruktur mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian serta pengungkapan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah (Fauzi dan Hasanah, 2017). Hasil dari rangkaian proses tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Pratama (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi wujud fungsi akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan laporan keuangan pokok yang dihasilkan dari proses akuntansi pemerintah mencakup tujuh jenis laporan yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan SAL (LPSAL); 3) Laporan Operasional (LO); 4) Laporan Arus Kas (LAK); 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 6) Neraca; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Badan Layanan Umum (BLU) menurut PSAP nomor 13 yaitu instansi pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mengutamakan mengumpulkan keuntungan dan melaksanakan kegiatan dengan prinsip produktivitas dan efisiensi. Pengertian belanja BLUD tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu semua pengeluaran kas dari rekening kas BLUD yang akan mengurangi ekuitas dana lancar terjadi dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Atas pengeluaran tersebut, BLUD tidak akan memperoleh pembayaran kembali. Belanja BLUD diungkapkan pada CaLK dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas pelaporan atau entitas akuntansi yang membawahnya. Hal tersebut diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Belanja BLU menurut PSAP nomor 13 digolongkan berdasarkan kelompok ekonomi, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi belanja ekonomi untuk BLU terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Klasifikasi belanja organisasi mengelompokkan belanja berdasarkan satuan organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi fungsi mengelompokkan belanja tergantung pada fungsi utama pemerintah atas pemberian pelayanan pada masyarakat.

Akuntansi belanja pemerintah diterapkan di setiap satuan kerja di bawah pemerintah termasuk RSUD Soedirman Kebumen. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 445/565/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Kebumen sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Soedirman Kebumen menerapkan PPK-BLUD dengan Status Penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. RSUD Soedirman Kebumen menjadi SKPD-BLUD yang berdiri sendiri dengan Pengguna Anggaran untuk pengadaan dijabat oleh Pemimpin BLUD. Dengan menerapkan PPK-BLUD, RSUD Soedirman Kebumen memiliki fleksibilitas dalam mengatur belanjanya sendiri.

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 adalah wabah yang disebabkan oleh virus *corona* jenis baru SARS-CoV-2 (Morfi, 2020). Wabah COVID-19 menyebar di berbagai negara di seluruh dunia dan terdeteksi mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi memberikan dampak di berbagai sektor termasuk sektor keuangan negara. Perekonomian diprediksi menurun sementara pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Sebagai tindakan preventif atas kemungkinan dampak yang lebih buruk pada keuangan negara, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan. Akibatnya, postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami perubahan penyesuaian.

Munculnya pandemi COVID-19 juga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas operasional RSUD Soedirman Kebumen sebagai salah satu satuan kerja dalam bidang kesehatan. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020, RSUD Soedirman Kebumen diberi tugas baru yaitu sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah. Tujuannya agar RSUD Soedirman Kebumen dapat memberi pelayanan kesehatan terbaik secara berkelanjutan mulai dari preventif hingga kuratif terkait penanganan COVID-19. Hal tersebut sejalan dengan tujuan BLUD yang tercantum pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunaikan tugas pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

Lathifah (2020) dalam Tinjauan atas Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Belanja di RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan menyebutkan bahwa secara umum penerapan belanja tidak berbeda dibanding sebelum pandemi karena fungsi Pengguna Anggaran BLUD tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga perubahan yang diperlukan akibat pandemi COVID-19 dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai akuntansi belanja pemerintah di RSUD Soedirman Kebumen yang merupakan BLUD yang berdiri sendiri dengan fungsi Pengguna Anggaran dijabat oleh Pemimpin BLUD. Dalam karya tulis ini, penulis

meninjau dampak pandemi terhadap penerapan akuntansi belanja dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi belanja BLUD pada RSUD Soedirman Kebumen pada masa pandemi. Penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berjudul “Tinjauan atas Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Belanja BLUD pada RSUD Soedirman Kebumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah yang dapat ditelaah yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19 terhadap anggaran dan realisasi belanja RSUD Soedirman Kebumen?
- 2) Bagaimana penerapan akuntansi belanja BLUD di RSUD Soedirman Kebumen pada masa pandemi COVID-19?
- 3) Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi belanja BLUD pada RSUD Soedirman Kebumen dengan SAP dan peraturan lainnya yang terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

- 1) Mengetahui pengaruh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19 terhadap anggaran dan realisasi belanja RSUD Soedirman Kebumen.
- 2) Mengetahui penerapan akuntansi belanja BLUD di RSUD Soedirman Kebumen pada masa pandemi COVID-19.
- 3) Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi belanja BLUD pada RSUD Soedirman Kebumen dengan SAP dan peraturan lainnya yang terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA ini, penulis membatasi pembahasan hanya mencakup kebijakan, prosedur, penerapan akuntansi, dan kesesuaian penerapan akuntansi dengan SAP dan peraturan lainnya terkait belanja di RSUD Soedirman Kebumen. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam melakukan peninjauan adalah informasi dari laporan keuangan tahun 2019 sebagai periode sampel belanja rumah sakit sebelum pandemi dan laporan keuangan tahun 2020 sebagai periode sampel belanja rumah sakit di masa pandemi.

1.5 Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Akademis

KTTA ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan, penerapan akuntansi, dan kesesuaian penerapan akuntansi dengan SAP dan peraturan lainnya yang berkaitan di RSUD Soedirman Kebumen pada masa pandemi dan sebelum pandemi. KTTA ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai akuntansi belanja pada BLUD bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini di masa depan.

2) Manfaat Praktis

KTTA ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki mengenai akuntansi belanja pada BLUD. KTTA juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan dan antisipasi bagi pemerintah maupun manajemen bila terjadi hal tidak terduga lagi seperti pandemi COVID-19 di masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum atas karya tulis. Hal tersebut mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan uraian teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir. Uraian mencakup definisi dari istilah-istilah penting yang ditekankan dan penelitian-penelitian terdahulu terkait masalah yang diangkat. Selain itu, akan dijelaskan juga ketetapan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data. Bab ini membahas hasil tinjauan atas masalah yang diangkat. Penulis mengolah data yang didapat di lapangan berupa laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dari subjek penyedia yaitu RSUD Soedirman Kebumen, dikaitkan dengan teori serta peraturan-peraturan terkait yang telah dipelajari.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi simpulan atas uraian dari bab-bab sebelumnya terkait topik Akuntansi Belanja di RSUD Soedirman Kebumen.